ABSTRAK

Ismail, NIM 10210109, 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perkawinan Kedua: Pandangan Hakim PA Kabupaten Malang dan Aktivistis Gender Kota Malang (Studi Kasus No: 6445/Pdt.G/2013/PA. Kab. Malang)*. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Perkawinan Kedua.

Secara realita, praktik perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri, masih berlaku di kalangan masyarakat. Tidak adanya persetujuan dari istri pertama menjadi salah satu faktor bagi suami yang hendak melakukan poligami. Sehingga ditempuhlah jalur perkawinan sirri sebagai alternatif untuk berpoligami. Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menimbulkan dampak permasalahan hukum yang rumit. Misalnya ketika akan membuat akta kelahiran seorang anak yang lahir dari perkawinan tersebut, harus mempunyai akta nikah terlebih dahulu. Karena perkawinannya tidak dicatatkan, harus meminta ke Pengadilan Agama untuk dilegalkan perkawinannya. Di Pengadilan Agama pun akan menemui kesulitan karena dia harus menghadapi istri pertama yang tidak menyetujuinya untuk berpoligami. Apalagi ketika hakim memutuskan untuk menolak permohonan izin poligami tersebut. Sehingga dengan begitu akan sangat kesulitan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya. Tentu hal ini bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan aktivis gender Kota Malang tentang perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang terkumpul merupakan data primer yang didukung dengan data sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitik.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan anak dalam perkawinan kedua menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak dapat dikabulkan. Dengan pertimbangan bahwa perkawinan kedua yang dilakukan secara poligami, tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan aktivis gender berpandangan bahwa hak-hak anak dalam perkawinan seperti apapun harus tetap dilindungi. Mengingat anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan, tidak absah bila anak menanggung beban akibat perkawinan orang tuanya yang bermasalah. Dengan pertimbangan prinsip kepentingan terbaik untuk anaklah yang harus dijadikan pertimbangan yang paling utama (*a primary consideration*).